



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Ikan Gratis Di Kabupaten Bogor

Annisya Nurfadhillah<sup>1</sup>, Saprudin<sup>2</sup>, Agus Suarman Sudarsa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda, [annisyanurfadhillah62@gmail.com](mailto:annisyanurfadhillah62@gmail.com).

<sup>2</sup> Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda, [saprudin@unida.ac.id](mailto:saprudin@unida.ac.id).

<sup>3</sup> Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda, [agussuarman1@unida.ac.id](mailto:agussuarman1@unida.ac.id).

Corresponding Author: [annisyanurfadhillah62@gmail.com](mailto:annisyanurfadhillah62@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Free Fish Seed Assistance Program is one of the local government's efforts to increase aquaculture production and the welfare of small-scale fish farmers in Bogor Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with George C. Edward III policy implementation theory which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of the program went quite well through the active role of fisheries extension workers and a clear organizational structure. However, the program faces obstacles such as limited human resources and budget, facilities and infrastructure of the Fish Seed Center that are not optimal, and low community understanding of program procedures. Efforts made include increasing socialization, strengthening coordination between agencies, and educating cultivators about the program mechanism. Continuous improvement is needed in the aspects of communication, resources, facilities, and bureaucratic governance so that the program objectives are optimally achieved.*

**Keyword:** *Policy Implementation, Fish Seed Assistance, Edward III, Bogor Regency, Aquaculture.*

**Abstrak:** Program Bantuan Benih Ikan Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berjalan cukup baik melalui peran aktif penyuluh perikanan dan struktur organisasi yang jelas. Namun, program menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sarana dan prasarana Balai Benih Ikan yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur program. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi kepada pembudidaya mengenai mekanisme program. Diperlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek komunikasi, sumber daya, fasilitas, dan tata kelola birokrasi agar tujuan program tercapai secara optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Bantuan Benih Ikan, Edward III, Kabupaten Bogor, Perikanan Budidaya.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan publik memegang peranan penting sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, terus berupaya menciptakan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan di berbagai sektor, termasuk sektor perikanan budidaya yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah Program Bantuan Benih Ikan Gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan potensi sumber daya perairan yang melimpah, mengembangkan program ini melalui Dinas Perikanan dengan memberikan bantuan benih ikan kepada kelompok pembudidaya sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sektor perikanan.

Program ini bertujuan memberikan dukungan kepada pembudidaya ikan skala kecil dan pemula melalui pemberian benih ikan secara cuma-cuma, guna meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya permintaan benih akibat perkembangan teknologi budidaya dan perluasan areal tambak, program ini menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan pemenuhan benih berkualitas.

**Tabel 1. Data Bantuan Benih Ikan Gratis**

| No | Thn  | BBI<br>Cibitung    | BBI<br>Cijeruk    | Jumlah             |
|----|------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 2021 | 10.193.500<br>ekor | 6.061.950<br>ekor | 16.255.450<br>ekor |
| 2  | 2022 | 10.396.500<br>ekor | 6.289.445<br>ekor | 16.676.945<br>ekor |
| 3  | 2023 | 10.054.805<br>ekor | 8.289.865<br>ekor | 18.344.670<br>ekor |

*Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, 2024*

Data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa jumlah benih ikan yang disalurkan mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai lebih dari 18 juta ekor pada tahun 2023. Namun demikian, implementasi program tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterlambatan dalam penyaluran akibat validasi data penerima yang belum merata, serta keterbatasan sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan (BBI). Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh proses pelaksanaannya. George C. Edward III menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dalam menentukan efektivitas suatu kebijakan di lapangan. Dalam konteks Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor, penting untuk menelaah sejauh mana proses komunikasi antar pemangku kebijakan berjalan, bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, sejauh mana komitmen dan sikap pelaksana program, serta bagaimana struktur birokrasi mendukung pelaksanaan program secara efisien.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor berdasarkan perspektif teori Edward III. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna mengatasi kendala tersebut. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan ke depan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan pemerataan program bantuan di sektor perikanan budidaya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam bidang administrasi publik serta pengelolaan sumber daya perikanan di

daerah. Program Bantuan Benih Ikan Gratis merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan.

Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari grand theory kebijakan publik. Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih oleh pemerintah dalam rangka mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat luas. Kebijakan bukan hanya monopoli pemerintah formal (government), tetapi juga mencakup pendekatan kolaboratif dalam governance. Bridgman dan Davis (2005) menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan demikian, kebijakan mencerminkan tujuan, pilihan legal, serta hipotesis yang melandasi tindakan publik.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai pendekatan utama untuk menganalisis pelaksanaan program. Sebagai mana Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan utama dalam implementasi kebijakan, yaitu: Prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu kebijakan bisa berhasil dan Hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan gagal. Untuk menjawabnya, ia mengidentifikasi empat faktor krusial dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap atau kecenderungan), dan struktur birokrasi (Purba & Saprudin, 2020). Edward III (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penerjemahan keputusan politik menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini saling berinteraksi dan menjadi kunci untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dari sisi substansi program, pembenihan ikan merupakan kegiatan penting dalam rantai usaha budidaya perikanan. Menurut Usni dan Deni (2013), pembenihan bertujuan untuk menghasilkan benih ikan berkualitas yang nantinya dibesarkan hingga siap konsumsi. Model usaha ini memiliki siklus perputaran modal yang relatif cepat dan sangat tergantung pada ketersediaan benih yang bermutu. Oleh karena itu, keberhasilan program bantuan benih ikan juga erat kaitannya dengan sistem pembenihan yang efektif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah di sektor perikanan memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya, namun masih menghadapi tantangan implementatif. Zulkarnain et al. (2020), Padmoko et al., Parmanda (2019), dan Pasa (2016), misalnya, menunjukkan pentingnya pendampingan, pemerataan distribusi bantuan, serta sarana dan pengetahuan teknis. Penelitian lain oleh Elman (2023) dan Soeparan (2022) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan tata kelola yang baik dalam mendukung keberhasilan program.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur terdahulu, tetapi juga memberikan perspektif implementatif terhadap Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana kebijakan ini berjalan efektif, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian ini relevan sebagai bahan evaluasi dan perumusan strategi kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat perikanan di daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi realitas sosial secara komprehensif, khususnya dalam konteks kebijakan publik. Data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan induktif, sehingga setiap temuan di lapangan menjadi landasan dalam menyusun pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Bersih, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses penelitian berlangsung selama enam bulan sejak disetujuinya seminar proposal.

**Teknik pengumpulan data** dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif untuk mengamati proses implementasi kebijakan di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, kepala UPT, penyuluh perikanan, dan ketua kelompok tani penerima bantuan. Dokumentasi diperoleh dari arsip, laporan kegiatan, foto, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan program.

**Penentuan informan** dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Informan terdiri dari pejabat struktural di Dinas Perikanan dan Peternakan, pelaksana teknis di UPT Balai Benih Ikan, serta penerima manfaat program. Tabel berikut merangkum jumlah informan:

**Tabel 2. Data Informan**

| No. | Informan                                               | Jumlah  |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan                  | 1 Orang |
| 2   | Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap | 1 Orang |
| 3   | Kepala UPT Balai Benih Ikan                            | 2 Orang |
| 4   | Ketua Kelompok Tani                                    | 3 Orang |
| 5   | Penyuluh Perikanan                                     | 1 Orang |

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup empat dimensi utama, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Setiap dimensi dijabarkan ke dalam indikator yang digunakan sebagai landasan dalam pengumpulan dan analisis data.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan berdasarkan dimensi dalam teori. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, tabel, dan skema untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Verifikasi dan validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, serta diskusi dengan ahli kebijakan publik untuk memastikan keabsahan temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor

Program Bantuan Benih Ikan Gratis yang diimplementasikan di Kabupaten Bogor merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam mendukung sektor perikanan budidaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan. Dalam pelaksanaannya, program ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik dengan adanya peningkatan jumlah benih ikan yang didistribusikan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, jumlah benih yang disalurkan meningkat dari tahun ke tahun, mencapai lebih dari 18 juta ekor pada tahun 2023.

Implementasi kebijakan publik harus memperhatikan keadilan sosial sebagaimana prinsip-prinsip Islam, yakni partisipasi masyarakat, pemerataan manfaat, serta keberpihakan kepada golongan lemah (Sudarsa, A.S, 2024). Dalam implementasi Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor, nilai keadilan sosial menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Kebijakan ini tidak hanya perlu menjangkau masyarakat lapisan bawah, tetapi juga harus mencerminkan prinsip partisipasi, pemerataan manfaat, dan keberpihakan pada kelompok lemah. Dalam proyek strategis nasional, masyarakat tidak boleh sekadar menjadi objek, melainkan harus dilibatkan secara aktif agar kebijakan benar-benar dirasakan

manfaatnya. Oleh karena itu, masyarakat pembudidaya ikan seharusnya tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dilibatkan secara aktif agar manfaat program benar-benar dirasakan secara adil dan merata.

Namun, pelaksanaan program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dalam aspek teknis maupun administratif. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam distribusi benih akibat kurangnya validasi data penerima manfaat yang tersebar di berbagai kecamatan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana di Balai Benih Ikan (BBI), yang menyebabkan produksi benih belum mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat.

### **Analisis Hambatan dan Upaya Penyelesaian**

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran
  - a. SDM yang terbatas menghambat efektivitas distribusi benih dan pendampingan teknis kepada pembudidaya.
  - b. Anggaran yang masih kurang menyebabkan keterbatasan dalam pengadaan sarana pendukung produksi benih.
2. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat
  - a. Banyak masyarakat pembudidaya yang masih kurang memahami prosedur administratif dalam pengajuan bantuan.
  - b. Sosialisasi yang dilakukan masih belum merata, sehingga ada beberapa kelompok pembudidaya yang belum terjangkau oleh informasi program ini.
3. Kendala Sarana dan Prasarana
  - a. Balai Benih Ikan (BBI) yang menjadi pusat produksi dan distribusi benih masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas produksi.
  - b. Infrastruktur pendukung seperti saluran air dan teknologi pembenihan modern masih belum optimal diterapkan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah daerah telah mengambil beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan Sosialisasi: Melalui penyuluhan langsung dan pemanfaatan media digital untuk menyebarkan informasi terkait program bantuan benih ikan.
2. Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor: Memperkuat kerja sama antara Dinas Perikanan, UPT BBI, penyuluh perikanan, serta kelompok pembudidaya untuk memastikan distribusi benih lebih tepat sasaran.
3. Pengembangan Infrastruktur: Melakukan peningkatan sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan, termasuk penerapan teknologi Recirculation Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi benih.

### **Analisis Berdasarkan Teori Edward III**

Dalam analisis implementasi kebijakan ini, digunakan teori George C. Edward III yang menyoroti empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Program ini telah didukung oleh komunikasi yang cukup baik antara dinas terkait dan kelompok pembudidaya. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam kejelasan informasi dan diversifikasi media penyampaian agar lebih efektif.

#### **1. Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi salah satu kendala utama. Meskipun ada peningkatan dalam distribusi benih, masih diperlukan dukungan anggaran yang lebih besar serta pelatihan bagi tenaga teknis di lapangan.



## 2. Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana program dinilai cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 3. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang telah ada cukup mendukung implementasi kebijakan, tetapi masih perlu penguatan dalam koordinasi antarinstansi dan penyederhanaan prosedur bagi penerima manfaat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya struktur organisasi yang jelas, partisipasi aktif pelaksana, serta keterlibatan penyuluh perikanan dalam mendistribusikan informasi dan benih. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena masih ditemukan berbagai kendala teknis dan administratif.

Hambatan utama dalam implementasi program meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang berdampak pada efisiensi distribusi benih dan pelayanan pendampingan teknis.
2. Kurang optimalnya sarana dan prasarana Balai Benih Ikan, yang mengakibatkan keterbatasan produksi benih.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur program, yang menyebabkan tidak meratanya penerima manfaat.

Untuk meningkatkan efektivitas program, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi, dengan mengadakan pelatihan serta penyebaran informasi yang lebih luas dan sistematis.
2. Optimalisasi sistem koordinasi antarinstansi, guna meningkatkan efisiensi dalam distribusi benih dan pendampingan teknis.
3. Pengembangan infrastruktur pendukung, dengan menambah kapasitas produksi BBI serta menerapkan teknologi pembenihan modern.

Dengan adanya evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek ini, diharapkan Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat pembudidaya ikan.

## REFERENSI

- Abdulah, Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.
- Alfarizi, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Indonesia Terhadap Kebijakan Selektif Keimigrasian Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 169–178.
- Alfian, Martoyo, & Listiani, E. I. (2014). Implementasi program bantuan perikanan tangkap di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. *Jurnal Tesis PMIS*, 1–21.
- Anastasya, N., Lengkong, S. F. D. J., & Laloma, A. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Mengimplemntasikan Kebijakan Pembangunan SDM ( Di Kelurahan Tewa Kecamatan Ranowulu Kota Bitung). *Jurnal Adminsitrasi Publik*, 2(29), 1–10.
- Budiyono, B. H. dan. (2018). *Implementasi Kebijakan Lanal Kotabaru (Di Kalimantan Selatan) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. 1–17.
- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. (2023). *Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. (2024). *Buku Profil DISKANAK 2024*.

- Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dunggio, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida Di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/10.47918/v1i1.7>
- Elman, A. (2023). *Evaluasi Kinerja Program Pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar*. 5, 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Headlinekota.com. (2024, Juni 2). *Rangkaian HJB ke-542, Pj Sekda Kabupaten Bogor Tebar Benih Ikan dan Tanam Pohon di Situ Pemda Cibinong*.
- Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 657–666.
- Kasmad, H. R. (2015). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. 6.
- Luthfie, M. (2021a). *Kebijakan Publik Ruang Lingkup & Implementasi* (M. M. Dzikri.S.Kom (ed.)). PT Rajawali Buana Pusaka.
- Luthfie, M. (2021b). *Kebijakan Publik Ruang Lingkup dan Implementasi* (S. K. M. Dzikri (ed.)). PT Rajawali Buana Pusaka.
- Nugraha, M. R. (2024). Implementasi Metode Simple Additive Weinghting (SAW) dan Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) untuk penentuan kelompok penerima bantuan benih ikan. *Journal Syntax Idea*, 6(05).
- Padmoko, S., Studi, P., Industri, P., & Menengah, K. (n.d.). 17987-Article Text-55365-1-10-20171002. 1(1).
- Parmanda, W. R. (2019). *Program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman*. 5–10.
- Pasa, H. M. (2016). *Peran Dinas Peternakan dan Perikanan Dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Budidaya di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso*. 19(5), 1–23.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2014). *Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi Pertanian*. Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2022). *Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah*. Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Poppy Fitrijanti Soeparan. (2022). Peran Penting Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Tebar Ikan Untuk Kepentingan Restocking Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(1), 15–19. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v2i1.104>
- Purba, O., & Saprudin. (2020). *Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Vol. 4, Issue 1).
- Saefullah, D., Adiwisastro, J., & Mariana, D. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Siahaan, L. M., & Antonius KAP Simbolon. (2019). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Mas Di Desa Rumah Gerat. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3(2), 161–167. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i2.1478>
- Sudarsa, A. suarman. (n.d.). *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya dalam Perspektif Islam (2014-2023)*. <https://info.unida.ac.id/artikel/dosen-magister-administrasi-publik-sekolah-pascasarjana-unida-isi-majelis-tasbih-bahas-demokrasi-pancasila-dan-implementasinya-dalam-perspektif-islam>
- Sudarsa, A. suarman. (n.d.). *Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2)*. <https://www.unida.ac.id/post/majelis-tasbih-unida-kebijakan-publik-terkait-proyek-strategis-nasional-dalam-perspektif-islam-untuk-keadilan-sosial?>
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* (U. S. Maret (ed.)).

- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- UPT Balai Benih Ikan Cibitung. (2024). *Laporan Kinerja Tahun 2024*. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
- UPT Balai Benih Ikan Cijeruk. (2024). *Laporan Kinerja Tahun 2024*. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
- Zubaedi. (2013). *PENGEMBANGAN MASYARAKAT: WACANA DAN PRAKTIK* (p. 270). PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Zulkarnain, Heriyanto, M., & Karneli, O. (2020). Implementasi Program Bantuan Pakan Dan Benih Terhadap Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 96–105.